



**PROFIL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, Buku Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2018 dapat kami susun sesuai dengan rencana. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Buku Profil ini tidak hanya menyampaikan data dan gambaran umum Kabupaten Badung namun juga memberikan informasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Kami menyadari Buku Profil ini belumlah sempurna, untuk itu kami mohon masukan, saran dan koreksi untuk kesempurnaannya.

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Mangupura, 23 April 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

(I Wayan Suambara, SH.,MM)

Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMBANG DAERAH KABUPATEN BADUNG.....	iv
ARTI LAMBANG	v
PETA KABUPATEN BADUNG	vii
SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	viii
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Wilayah	1
1.2 Geografis	2
1.2.1 Letak dan Kondisi Geografis	2
1.2.2 Kepadatan Penduduk	3
BAB II GAMBAR UMUM KELITBANGAN	4
2.1 Pembentukan Balitbang	4
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
2.3 Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.....	7
2.4 Moto, Maklumat Pelayanan, dan Standar Pelayanan (SP).....	7
2.5 Sumber Daya Manusia	8
2.6 Prinsip-Prinsip Kelitbangan	8
2.7 Jenis-jenis Kelitbangan	9
2.7.1 Penelitian.....	9
2.7.2 Pengkajian.....	9
2.7.2.1 Pengkajian Strategis	9
2.7.2.2 Pengkajian Aktual.....	9
2.7.2.3 Pengkajian Kompetitif.....	10
2.7.3 Pengembangan	10
2.7.4 Perekayasaan	10

2.7.5 Penerapan	10
2.7.6 Pengoperasian	10
2.7.7 Evaluasi Kebijakan	10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN	
PENGEMBANGAN TAHUN 2017.....	11
3.1 Program Dan Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan	
tahun 2017	11
3.1.1 Kegiatan Forum Kelitbangan tahun 2017	11
3.1.2 Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan	
Pemerintah Kabupaten Badung.....	12
3.1.3 Fokus Grup Discusion (FGD) Penerapan E-Kinerja.....	14
3.1.4 Kegiatan Pengembangan Riset, Ilmu Pengetahuan,	
Teknologi dan Seni (IPTEK)	16
3.1.5 Pelaksanaan Kegiatan Innovation Festival (INOFEST)	
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung	
Tahun 2017	19
3.1.6 Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Green House di	
Kabupaten Badung	21
3.1.7 Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis	
Komoditi Ayam Ras Petelor di Kecamatan Petang	23
3.1.8 Penelitian Dampak Kegiatan Pariwisata pada Tingkat	
Pendapatan Masyarakat Sekitar Objek Pariwisata	
Unggulan di Kabupaten Badung	25
BAB IV PENUTUP.....	28



LAMBANG DAERAH KABUPATEN BADUNG

ARTI LAMBANG

Arti Lambang dan Warna Lambang Kabupaten Badung ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung.

1. Arti Lambang



Lambang Daerah Kabupaten Badung berbentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dan garis pinggir hitam dengan motto : “*Çūra Dharma Rakṣaka*” yang mempunyai arti “Kewajiban Pemerintah Untuk Melindungi Kebenaran dan Rakyatnya”.

Adapun arti Lambang Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Segi Lima Sama Sisi. Bentuk dasar segi lima sama sisi melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup Bangsa Indonesia. Warna dasar biru laut melambangkan wilayah Kabupaten Badung berbatasan gunung dan laut yang merupakan lambang kesuburan dan kenyamanan.

Meru Tumpang 11 (Sebelas). Meru berarti gunung yang melambangkan alam semesta atau *bhuwana* lambang kedamaian dan kemakmuran. *Tumpang 11 (sebelas)* melambangkan tingkat alam yang tertinggi dari semua arah (*eka dasa dhik lokapala*).

Keris. Keris adalah pusaka suci (*pajenengan*) melambangkan keberanian, kekesatriaan dan mencerminkan semangat Puputan Badung. *Luk* tiga pada keris melambangkan “*Tri Kisinanggeh Satria*”, yaitu tiga hal yang mewujudkan sifat kesatria:

- Arta yang berarti benda atau kekayaan materiil;
- Otot yang berarti kekuatan fisik/kesehatan;
- Kepradnyan yang berarti ilmu pengetahuan.

Padi dan Kapas Yang Diikat 11 (Sebelas) Kali Gulungan Tali. Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan. Padi sebanyak 16 (enam belas) butir, Tali pengikat sebanyak 11 (sebelas) gulungan, dan Kapas sebanyak 9 (sembilan) lembar, melambangkan tanggal 16 Nopember 2009, sebagai hari ditetapkannya Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Badung.

2. Warna Lambang

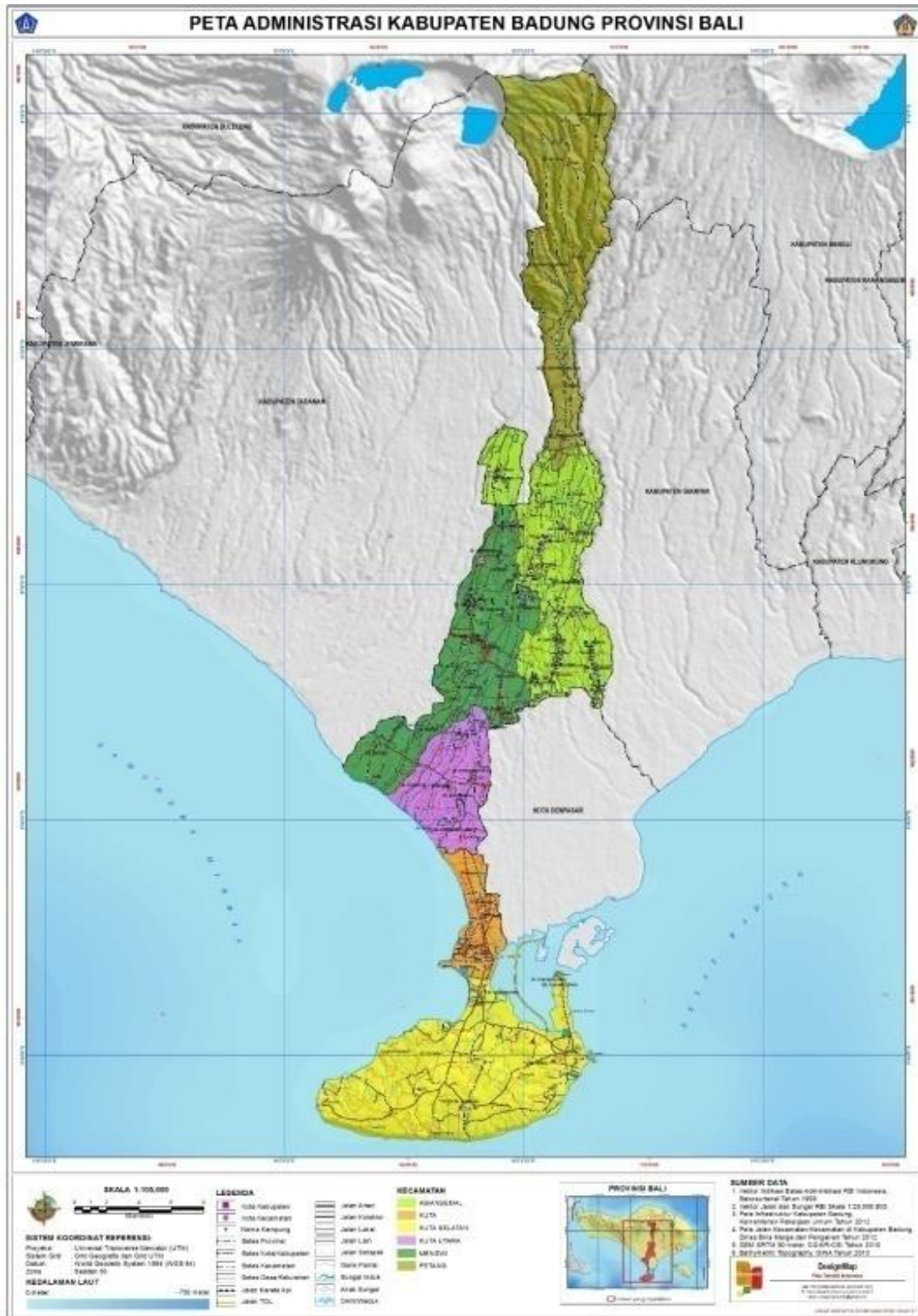
Ketentuan warna pada lambang daerah adalah :

1. Dasar Lambang berwarna biru laut.
2. Meru tumpang 11 (sebelas) berwarna putih.
3. Keris berwarna hitam.
4. Gagang keris berwarna kuning cendana.
5. Buah padi berwarna kuning emas.
6. Bunga kapas berwarna putih dengan daun berwarna hijau.
7. Tali pengikat padi kapas berwarna hitam.
8. Dasar tulisan pada pita berwarna putih.
9. Motto " Çura Dharma Raksaka " berwarna merah.

Arti warna pada lambang daerah adalah :

1. Warna dasar biru laut mengandung arti sumber kesejahteraan.
2. Warna putih mengandung arti kesucian.
3. Warna hitam mengandung arti kekuatan, ketegasan, dan keteguhan.
4. Warna kuning emas mengandung arti keluhuran/keagungan.
5. Warna kuning cendana mengandung arti kemakmuran.
6. Warna hijau mengandung arti kesuburan.
7. Warna merah mengandung arti keperwiraan/keberanian.

PETA KABUPATEN BADUNG



SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

- I. Ketua : Bupati Badung
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Badung
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bappeda kabupaten Badung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Badung
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Badung
4. Asisten Umum Setda Kabupaten Badung
5. Prof.Dr.dr. Ketut Suastika,Sp.PD.KEMD
6. Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS.,MM.
7. Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.
8. Prof. Dr I Wayan Ramantha, S.E.,M.M.,Ak.,CPA
9. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.
10. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH.
11. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Balitbang
Kabupaten Badung
- V. Staf Administrasi : 1. Para Kasubid / Kasubag pada Balitbang
Kabupaten Badung
2. Staf pada Balitbang Kabupaten Badung

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

I. UNSUR PELAKSANA

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- b. Ketua : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
2. Sekretaris badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
- c. Anggota : 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MM.
2. Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.
3. Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM.
4. Dr. Drs. Nyoman Subanda, M.Si.
5. Ir. I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja, M.S.
6. Ir. Linawati, MengSc. PhD.

II. UNSUR PENUNJANG

- a. Penanggungjawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
2. Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
3. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
4. Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pernerdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
5. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

6. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasaranan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

d. Anggota

: Staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki luas 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Badung terletak di bagian paling selatan dari Pulau Bali. Secara administratif, Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, sebelah timur dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Secara astronomis, Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20"–8°50'52" LS dan 115°05'03"–115°26'51"BT. Wilayah Kabupaten Badung membentang di tengah-tengah Pulau Bali yang meliputi daerah pegunungan, perbukitan serta laut dan pantai yang indah. Bagian utara merupakan kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan tingkat kesuburan yang tinggi sehingga cocok untuk dikembangkan berbagai komoditas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan bagian selatan dulunya dikenal sebagai kawasan perbukitan yang tandus dan berpotensi untuk pengembangan galian C seperti batu kapur, tetapi wilayah selatan saat ini sudah sangat berkembang menjadi pusat pariwisata dengan mengoptimalkan wilayah pantai dan perbukitan indah sebagai destinasi wisatawan dunia. Dengan letak yang menjorok ke laut, Kabupaten Badung memiliki hampir 28 persen (16 desa/kelurahan) di wilayah pesisir dengan panjang pantai yaitu sepanjang 64 km. Sisanya sebanyak 46 desa/kelurahan berada bukan di wilayah pesisir. Dengan potensi yang beragam tersebut, Kabupaten Badung mampu membangun wilayahnya dengan optimal.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase Luas Wilayah
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2.	Kuta	17,52	4,19
3.	Kuta Utara	33,86	8,09
4.	Mengwi	82,00	19,59
5.	Abiansemal	69,01	16,49
6.	Petang	115	27,48
BADUNG		418,52	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2017

1.2. GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" Bujur Timur dengan luas wilayah 418,52 km² atau sekitar 7,43% dari daratan Pulau Bali, terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari 6 kecamatan, Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 km², sedang Kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 17,52 km².

1.2.1. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Morfologi di wilayah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Dataran
2. Perbukitan Berelief Halus
3. Perbukitan Berelief Sedang
4. Perbukitan Berelief Kasar
5. Perbukitan Berelief Sangat Kasar

Pembagian satuan morfologi didasarkan pada bentuk bentang alam dan kemiringan lereng. Sebagian tanah di Kabupaten Badung tergolong jenis Inceptisols berbahan induk abu vulkan intermedier dan tuf. Terdapat pula tanah Andisol dari bahan induk yang sama terdapat di daerah hutan lindung yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng dan jenis tanah Entisols di sekitar dataran pantai Kuta. Wilayah perbukitan kapur di bagian selatan memiliki tanah Alfisols dengan fisiografi pengangkatan (*uplift*) daerah pantai. Vertisols ditemukan di daerah Canggu, Kerobokan mempunyai sifat mudah mengembang dan mengempis.

Tabel 1.2
Letak Astronomi Kabupaten Badung Dirinci per Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Kuta Selatan	08°46'58.7"	115°10'41.3"
2	Kuta	08°43'32.6"	115°10'39.2"
3	Kuta Utara	08°38'44.2"	115°09'42.3"
4	Mengwi	08°26'36"-08°39'16"	115°05'55"-115°12'20"
5	Abiansemal	08°26'59"-08°36'10"	115°11'38"-115°14'57"
6	Petang	08°14'17"-08°28'25"	115°11'01"-115°15'09"

Sumber: Sipd Kabupaten Badung Tahun 2017

1.2.2. KEPADATAN PENDUDUK

Kabupaten Badung menjadi salah satu tujuan migran di Provinsi Bali. Hal ini membawa dampak terhadap tingginya kepadatan penduduk yakni mencapai 1119 jiwa/km² pada Tahun 2017. Secara rinci, jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kuta Selatan	101.13	96.495	954
2	Kuta	17.58	53.573	3047
3	Kuta Utara	33.86	75.829	2239
4	Mengwi	82.00	120.246	1466
5	Abiansemal	69.01	91.305	1323
6	Petang	115.00	30.898	269
	Badung	418.52	468.346	1119

Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2017

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. SEJARAH PEMBENTUKAN BALITBANG

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dimulai pada Tahun 2016. Legalitas pembentukan dan operasional Perangkat Daerah Ini didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- d. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tugas pokok Balitbang Kabupaten Badung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Fungsi Balitbang Kabupaten Badung adalah untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

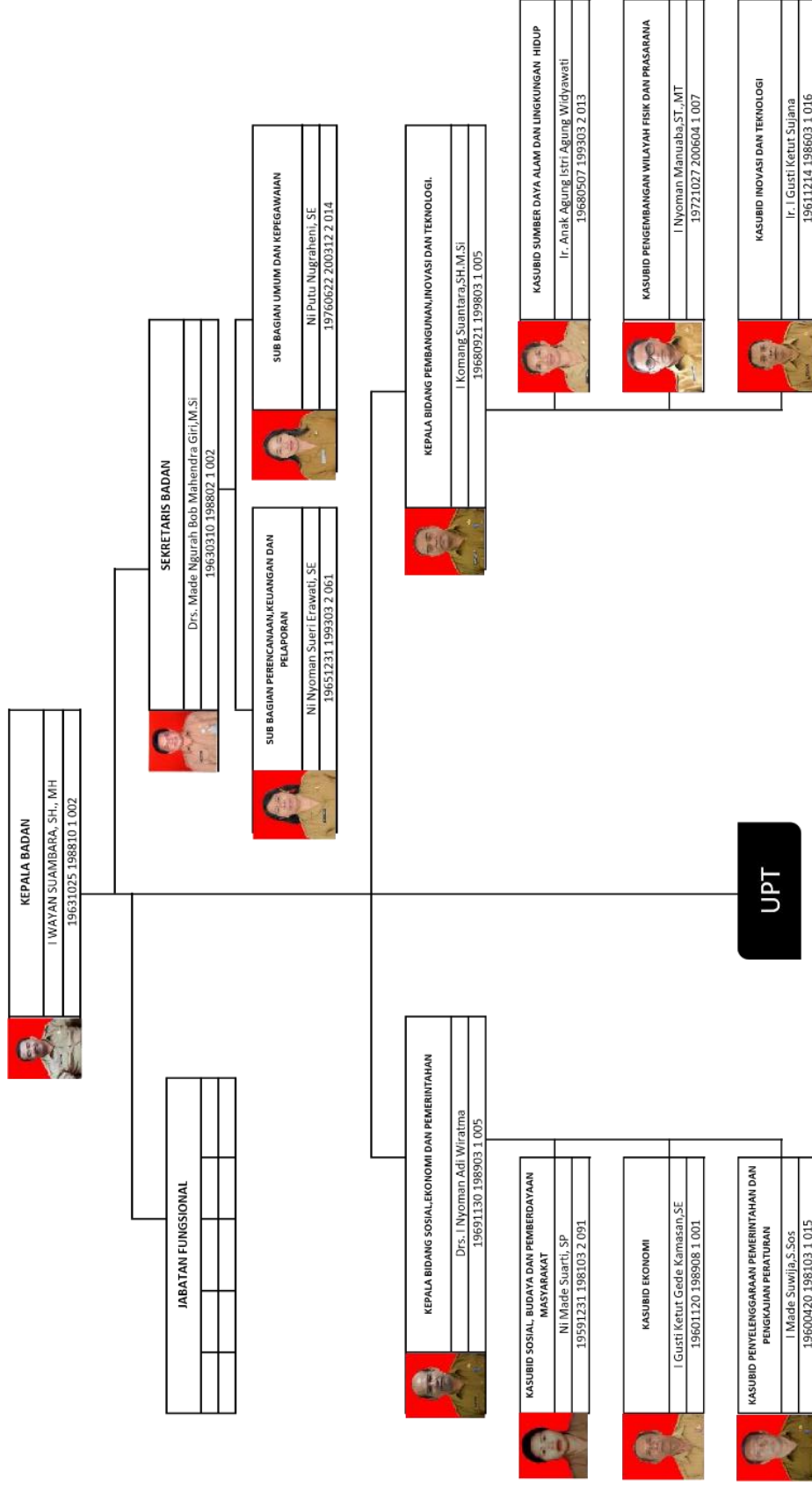
1. menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. menyusun kebijaksanaan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
3. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan instansi/ lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintah kabupaten;
4. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah Kabupaten
5. memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;

7. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
8. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
9. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran Badan;
10. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pejabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan Sruktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Bidang Ekonomi;
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung



2.3. VISI DAN MISI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG

VISI

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah:

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Berbasis Kelitbangan Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

MISI

Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Kabupaten Badung adalah:

- a. Mewujudkan Peran Kelitbangan Yang Berkualitas.
- b. Mewujudkan Pengembangan Potensi Pembangunan, Penerapan Ilmu Pengetahuan Serta Teknologi Yang Berdaya Guna Dan Berhasil Guna.
- c. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

2.4. MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN, DAN STANDAR PELAYANAN (SP)

2.4.1. Motto

1. Kaji, Teliti, Kembangkan dan Terapkan
2. Bekerja Ilmiah, Jujur, Inovatif, Profesional dan Bertanggung Jawab

2.4.2. Maklumat Pelayanan

“Kami Bertekad Melaksanakan Fungsi Kelitbangan Secara Profesional dan Bertanggung Jawab dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”

2.4.3. Standar Pelayanan (SP)

1. Kepala Balitbang Kabupaten Badung menerima instruksi dari pimpinan dan usulan dari PD untuk melakukan kegiatan Kelitbangan.
2. Kepala Balitbang Kabupaten Badung memerintahkan kepada sekretaris dan para Kabid melakukan pembahasan, apakah usulan tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan.
3. Kepala Bidang memerintahkan Kasubid untuk mempersiapkan rancangan kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan yang di laksanakan melalui swakelola/perjanjian kerja sama atau lelang.

4. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kajian maksimal 1 - 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaan penelitian maksimal 6 bulan
5. Setelah melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan hasilnya berupa rekomendasi dilaporkan ke pimpinan dan dilanjutkan sosialisasi serta diimplementasikan oleh PD.

2.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan operasional kegiatan sehari-hari didukung oleh sumber daya manusia / ASN. Dari 31 orang pegawai Balitbang Kabupaten Badung, sebagian besar berpendidikan S1 (sarjana), masing-masing 17 orang (54,84%). Pendidikan tertinggi adalah S2 (master) sebanyak 8 orang (25,81%), sedang terendah SMA sebanyak 6 orang (19,35%).

Perbandingan diantara masing-masing strata pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Balitbang sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
S2	8	25.81
S1	17	54.84
SMA	6	19.35
JUMLAH	31	100.0

2.6. PRINSIP-PRINSIP KELITBANGAN

Prinsip-prinsip pelaksanaan kelitbangan Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah, diarahkan dalam rangka penerapan kaidah-kaidah ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika penelitian dan kode etik peneliti, untuk menjamin integritas hasil kelitbangan, profesi, dan kelembagaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ilmiah**, yaitu kelitbangan menghasilkan naskah (dan atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
2. **Tepat**, yaitu kelitbangan dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu;
3. **Jujur**, yaitu kelitbangan harus berlandaskan bukti, fakta, data, dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada;
4. **Bertanggung jawab**, yaitu kegiatan kelitbangan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintah;

5. **Beretika**, yaitu kelitbangan harus berlandaskan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
6. **Profesional**, yaitu kelitbangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu;
7. **Berkeadilan**, yaitu kelitbangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
8. **Terbuka**, yaitu kelitbangan senantiasa menerima dan memberikan masukan, sarana dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain;
9. **Pengakuan**, yaitu kelitbangan menghargai hak kekayaan intelektual.

2.7. JENIS – JENIS KELITBANGAN

2.7.1. Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang terkait dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

2.7.2. Pengkajian

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2.7.2.1. Pengkajian Strategis

Pengkajian strategis adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

2.7.2.2. Pengkajian Aktual

Pengkajian Aktual adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kejadian terkini yang berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan dalam negeri dan daerah.

2.7.2.3. Pengkajian Kompetitif

Pengkajian Kompetitif adalah pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan

dengan berbagai kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Litbang.

2.7.3. Pengembangan

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatnya fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan negeri.

2.7.4. Perekayasaan

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kerja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah.

2.7.5. Penerapan

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2.7.6. Pengoperasian

Pengoperasian adalah kegiatan uji pelaksanaan uji rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektivitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri.

2.7.7. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan /program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung melaksanakan program dan kegiatan, berupa Penelitian dan Kajian serta melaksanakan FGD terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang bersifat strategis. Program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tahun 2018 yang begitu strategis yaitu :

3.1.1. KEGIATAN FORUM KELITBANGAN TAHUN 2018



Bupati Badung membuka Forum Kelitbangan Kabupaten Badung disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Wakil Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah, dibentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.

Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung bahwa salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Badung.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Badung perlu dilaksanakan suatu Forum Kelitbangan sebagai media komunikasi antar lembaga penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja, mutu hasil dan penentuan isu strategis sehingga tercipta suatu sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan lembaga litbang lainnya (Perguruan tinggi, LSM, Instansi Vertikal dan swasta/BUMN/BUMD) yang dikoordinir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Forum ini diharapkan dapat menjadi media strategis dalam membangun jejaring kelitbangan dalam mengawal akselerasi implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPNSB) di Kabupaten Badung.

3.1.2. RAPAT KOORDINASI MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.SOS memimpin rapat koordinasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung didampingi Wakil Bupati Badung dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau penelitian. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran penelitian (litbang) agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna. Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, lembaga penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan.

Dalam mencapai pelaksanaan kelitbangan yang optimal, telah dibentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 3588 / 03 / HK / 2017 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan melaksanakan tugas-tugas kelitbangan secara komprehensif, sehingga nantinya akan menghasilkan berbagai keluaran kelitbangan yang berkualitas.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari Ketua : Bupati Badung, Wakil Ketua : Wakil Bupati Badung dan Sekretaris Daerah, Sekretaris : Kepala Balitbang, Anggota : Kepala Bappeda, Para Asisten Setda, Prof.Dr.Dr. Ketut Suastika,Sp.Pd.Kemd, Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, Ms., Mm. Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak.,Cpa. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng Dan Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH.

Majelis Pertimbangan yang terdiri dari akademi para akademisi diharapkan turut memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun Badung yang berorientasi kepada pertumbuhan serta pemerataan pembangunan baik antar wilayah maupun antar sektor sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

3.1.3. FOKUS GRUP DISCUSSION (FGD) PENERAPAN E-KINERJA



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyerahkan hasil kajian Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

Dalam rangka mengawal pencapaian target kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 serta berbagai dokumen perencanaan lainnya, maka sangat dibutuhkan produktivitas kinerja seluruh pegawai secara terukur. Selanjutnya untuk memacu tingkat produktivitas kinerja tersebut, maka dipandang perlu menetapkan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja bagi para pegawai dengan berbasis kepada penerapan aplikasi E-Kinerja. Berkenaan dengan rencana perumusan kebijakan tersebut serta formulasi teknis dalam implementasinya, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyelenggarakan FGD yang diikuti oleh Staf Ahli, Para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala beserta Sekretaris Perangkat Daerah, para Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dengan menghadirkan 3 orang narasumber masing-masing :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung bertindak sebagai Keynote Speaker.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung dengan Judul materi “Konsepsi dan Konsekuensi Penerapan E-Kinerja dalam

rangka pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung.

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan Judul Materi "Sistem Penilaian Kinerja Pegawai E-Kinerja Kabupaten Badung.

Pada awal tahun 2018 nanti, Pemerintah Kabupaten Badung sudah siap menerapkan sistem aplikasi e-kinerja. Dengan e-kinerja diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Badung sehingga pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan optimal. Dengan sistem ini juga sangat menentukan dari besaran tunjangan kinerja yang akan diterima pegawai.

Penerapan e-kinerja ini merupakan langkah awal dalam rangka mencoba menterjemahkan aturan yang tertuang dalam PP No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi di Indonesia. Melalui penerapan e-kinerja diterapkan ASN di Badung dapat melangkah kedepan terutamanya dalam rangka merubah mindset dan paradigma ASN. "Dengan penerapan e-kinerja ini nanti ASN akan menyadari bahwa pendapatan yang tinggi itu linier dan berbasis pada kinerja

Dalam penerapan e-kinerja ini, Badan Litbang telah melakukan langkah-langkah kajian. Langkah yang dilakukan mulai dari melaksanakan Forum Group Discussion (FGD), melakukan kunjungan konsultasi penerapan aplikasi e-kinerja dan tunjangan kinerja di Badan Kepegawaian Negara RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari FGD dan konsultasi tersebut telah dibuat rekomendasi terhadap penerapan aplikasi e-kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Badung baik rekomendasi dari aspek filosofis, aspek yuridis maupun aspek psikologis dan sosiologis. Rekomendasi yang dibuat diantaranya; penerapan e-kinerja akan dilakukan mulai awal tahun 2018, dengan menggunakan dua formula yaitu, formula statis 80% dan formula dinamis 20% yang dibagi dalam kedisiplinan/absensi 50% dan kinerja 50%. Dijelaskan, berbasis disiplin adalah kehadiran berdasarkan absensi dengan asumsi 22 hari kerja. Sementara ketidak hadiran berkaitan erat dengan kinerja, sehingga penghitungan pembayarannya secara detail diatur dalam peraturan Bupati. Mengenai kinerja, dimana pembayaran kinerja ditentukan sesuai dengan tingkat kehadiran dengan catatan wajib menginput laporan kerjanya setiap bulan yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta termuat dalam sasaran kinerja pegawai (SKP). Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa SKP merupakan implementasi dari Renja perangkat daerah yang mengacu kepada pencapaian target RPJMD Semesta Berencana.

3.1.4. KEGIATAN PENGEMBANGAN RISET, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI (IPTEK)

Pemerintah Daerah kabupaten Badung hendaknya memberdayakan secara optimal potensi-potensi yang ada termasuk potensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diupayakan langkah-langkah strategis yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Fakta empiris menunjukkan bahwa budaya kreatif inovatif menjadi salah satu perkembangan suatu daerah yang tidak selalu ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan daerahnya. Generasi muda merupakan bibit unggul bangsa yang diharapkan dapat dan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui inovasi-inovasi sains dan teknologi.

Beranjak dari hal di atas, untuk memacu pencapaian hasil kreativitas dan inovasi yang perlu dilakukan maka diperlukan suatu wadah untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, yang ditandai munculnya berbagai produk unggulan yang mampu mengangkat harkat martabat masyarakat di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Balitbang Kabupaten Badung memberi ruang berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan “Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung” melalui penganugerahan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten Tahun 2017.



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan saat kunjungan ke Kelompok Nelayan Wana Sari yang mengembangkan budi daya kepiting bakau

Kelompok nelayan Wana Sari yang berlokasi Jalan Bypass Ngurah Rai Kelurahan Tuban kecamatan Kuta Kabupaten Badung dibentuk pada Tahun 2008 dan sampai saat ini beranggotakan 95 orang, yang terus menerus melakukan langkah-langkah pembudidayaan

kepiting bakau, bahkan kelompok ini juga sering menjadi objek penelitian perguruan tinggi, praktek kerja lapangan mahasiswa dari luar Bali serta telah pula mendapat kunjungan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti .

Banyaknya kepiting bakau yang ditangkap secara bebas merupakan salah satu penyebab berkurangnya populasi kepiting bakau sehingga ada keinginan kelompok untuk membudidayakan kepiting bakau dengan menggunakan keramba jaring dengan pola pembesaran dan pembibitan menggunakan teknik pembudidaya 1 jantan dengan 4 betina yang sudah menunjukkan tingkat keberhasilan 80% dari larva yang terseleksi.

Pembudidayaan kepiting bakau ini masih sangat potensial baik dari segi populasi maupun pasar. Bahkan pada awalnya kelompok nelayan ini mensuplay kepiting bakau ke berbagai restoran dan hotel , namun sejak dikembangkannya restoran kampoeng kepiting di lokasi ini produksi sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan usaha kelompok rata rata minimal 50Kg/hari. Kelompok ini sangat mengharapkan dukungan pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pembudidayaan ini sehingga dapat menambah penghasilan para nelayan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mengapresiasi usaha dan kerja keras kelompok nelayan tersebut bahkan akan memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan budidaya kepiting bakau sekaligus meneliti diversifikasi produksi olahan biji mangrove dalam bentuk kopi mangrove dan teh mangrove, dan akan melaporkan aktifitas kelompok nelayan ini kepada Bupati Badung terlebih lagi kegiatan ini secara substansi merupakan implementasi dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) bahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung berobsesi agar kampoeng kepiting ini bisa menjadi salah satu ikon ekowisata di kabupaten Badung terlebih lagi lokasi berada dekat dari bandara Ngurah Rai dan kawasan pariwisata



Kelapa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menerima langsung Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana

Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, mengundang Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana untuk mendiskusikan temuan inovatif yang bersumber dari habitat kawasan Mangrove. Dalam diskusi tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mendorong dan mengajak para mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang kandungan biji Mangrove serta olahan yang dapat dihasilkan misalnya sirup biji Mangrove, Wedang (kopi) biji mangrove, lulur atau mungkin manfaat lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan karena Kabupaten Badung memiliki kawasan Mangrove yang potensial dan diharapkan tidak saja hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi bagi biota laut tapi juga harus memberi manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Ketua Kelompok Studi Mangrove Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Pande Komang Egar Prihandana yang didampingi oleh Wakil Ketuanya William Boom Alwer menanggapi positif ajaran tersebut. bahkan diinformasikan pula bahwa Program Studi mereka juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dan menyanggupi akan segera mengambil langkah-langkah bersama dosen pembimbingnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung berharap agar secara paralel dilakukan pula pemetaan potensi mangrove untuk mengetahui potensi biji mangrove sebagai bahan baku olahan, penerapan teknologi pengolahan sampai dengan wujud hasil olahan dan memprioritaskan pelaksanaan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, dan pada waktunya nanti baru dipikirkan pemasaran hasil olahan tersebut. Kegiatan ini sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Bila ini berhasil diwujudkan maka tidak tertutup kemungkinan Kabupaten Badung akan memiliki ikon baru berupa Ecowisata Mangrove yang memiliki keanekaragaman manfaat, tegasnya.

3.1.5. PELAKSANAAN KEGIATAN INNOVATION FESTIVAL (INOFEST) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH Beserta Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH., MM. pada pelaksanaan lomba Inofest tahun 2017

Otonomi daerah harus dipahami sebagai peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan secara optimal potensi-potensi yang ada di daerah, termasuk potensi RIPTEKS (Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni). Sesuai dengan visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, maka perlu diupayakan langkah-langkah strategis melalui potensi RIPTEKS yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Fakta empiris menunjukkan bahwa budaya kreatif inovatif menjadi salah satu perkembangan suatu daerah yang tidak selalu ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan daerahnya. Generasi muda merupakan bibit unggul bangsa yang diharapkan dapat dan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui inovasi-inovasi sains dan teknologi.

Beranjak dari hal di atas, untuk memacu pencapaian hasil kreativitas dan inovasi yang perlu dilakukan maka diperlukan suatu wahana untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya terdidik, yang ditandai munculnya berbagai produk unggulan yang mampu mengangkat harkat martabat masyarakat di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Balitbang Kabupaten Badung memberi ruang berkreasi dan berinovasi yang diwadahi dalam sebuah kegiatan “Innovation Festival (INOFEST) Tahun 2017” yang nantinya diharapkan kegiatan ini mampu menjadi akselerator transfer gagasan - gagasan kreatif dan inovatif ke dalam implementasinya di masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung mengapresiasi pelaksanaan Innovation Festival yang diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Dikatakannya iptek memiliki nilai-nilai strategis dan urgensi dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa. Pengalaman dari bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa iptek dapat menjadi tulang punggung dalam membangun peradaban, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam bidang iptek. Rangkaian kegiatan innovation festival (inofest) ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan rasa bangga atas karya inovasi kreatif di bidang iptek.

Tantangan lain dalam bidang penelitian dan inovasi adalah belum adanya konsep intermediasi antara peneliti dan pembuat kebijakan di bidang lain untuk menghasilkan infrastruktur iptek yang memadai bagi pengembangan inovasi teknologi. Kekurangan infrastruktur akibat lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat dan terbatasnya sumber daya iptek serta rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, merupakan faktor-faktor yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Inofest merupakan prakarsa Balitbang Kabupaten Badung dan baru pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Balitbang Kabupaten Badung.

Adapun jumlah peserta yang mendaftar sejumlah 40 kelompok, terdiri dari tingkat SMP 7 kelompok, tingkat SMA 14 kelompok dan tingkat Perguruan Tinggi 19 kelompok. Namun yang lolos seleksi berdasarkan hasil penilaian oleh tim juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Provinsi Bali serta Universitas Udayana ke tahap presentasi sejumlah 23 kelompok, terdiri dari tingkat SMP 3 kelompok, tingkat SMA 10 kelompok dan tingkat Perguruan Tinggi 10 kelompok yang nantinya akan menghasilkan 3 peringkat di masing – masing kategori.



Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, SH menyerahkan penghargaan kepada Pemenang Inovation Festival Tahun 2017

Ternyata banyak inovasi baru yang muncul dari siswa dan mahasiswa dan perlu didalami lebih lanjut untuk bisa diimplementasikan baik yang di bidang IT maupun bidang lainnya, sedangkan Silpakara Nugraha adalah penghargaan kepada mereka yang berinovasi dan telah terbukti hasilnya yang dilakukan oleh kelompok2 masyarakat terutama yang aplikatif dalam kehidupan sehari hari dan bernilai ekonomis.

3.1.6. KEGIATAN STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN GREEN HOUSE DI KABUPATEN BADUNG



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung memimpin pembahasan hasil Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kabupaten Badung

Kabupaten Badung memiliki dua karakteristik wilayah yang berbeda antara wilayah Kabupaten Badung di bagian utara dan di bagian selatan. Wilayah Badung di bagian utara dengan agroklimat pegunungan diarahkan untuk kawasan budidaya pertanian, sedangkan wilayah Kabupaten Badung di bagian selatan dengan karakteristik lahan pesisir diarahkan untuk pengembangan industri (pariwisata). Kabupaten Badung dengan luas 41.852 ha diantaranya dipergunakan untuk pertanian lahan sawah lebih dari 10.200 ha dan lahan pertanian bukan sawah (tegalan, perkebunan, hutan rakyat, dan lainnya) lebih dari 18.000 ha. Wilayah Kabupaten Badung di bagian utara khususnya di Kecamatan Petang sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga, sedangkan wilayah Badung di bagian selatan seperti Nusa Dua dan Kuta yang merupakan kawasan pariwisata dengan fasilitas akomodasi dan restaurant yang luas sangat potensial untuk pengembangan pasar bagi hasil produksi pertanian tersebut.

Adanya kecenderungan perubahan iklim belakangan ini telah banyak menimbulkan kerugian terutama bagi petani produsen. Keadaan cuaca yang tidak menentu berdampak

pada musim tanam dan panen yang tidak menentu pula. Petani sering kesulitan dalam memprediksi cuaca dalam musim tanam. Teknologi green house atau rumah tanaman merupakan salah satu alternatif solusi pengendalian kondisi iklim mikro pada tanaman. Penggunaan green house dalam usaha tani adalah salah satu teknologi rekayasa lingkungan yang lebih mendekati kondisi optimum bagi pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman dapat masuk ke dalam green house sedangkan tanaman terhindar dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu suhu udara yang terlalu rendah, curah hujan yang terlalu tinggi, dan tiupan angin yang terlalu kencang. Di dalam green house, parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuhan yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembaban udara, pasokan nutrisi, kecepatan angin, dan konsentrasi karbondioksida dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Melalui teknologi green house dimungkinkan modifikasi lingkungan yang tidak sesuai menjadi lebih mendekati kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. Struktur green house berinteraksi dengan parameter iklim di sekitar green house dan menciptakan iklim mikro di dalamnya yang berbeda dengan parameter iklim di sekitar green house.

Secara fungsional teknologi green house ini bisa menjadi solusi petani dalam menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu karena dalam green house lingkungan bisa dikendalikan bagaimana pun kondisi lingkungan di luar green house. Namun, secara ekonomi, teknologi green house belum dikembangkan secara optimal, yang salah satu kendalanya karena investasi yang dikeluarkan untuk membangun green house cukup tinggi. Selama ini tanaman yang dibudidayakan di dalam greenhouse hanyalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti paprika, tomat, dan bunga-bunga. Hasil kajian/analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) green house sangat sulit didapatkan, oleh karena itu diperlukan kajian mendalam terkait pengembangan green house untuk peningkatan kapasitas, kualitas, kontinuitas produksi dan pemasaran hortikultura di Kabupaten Badung.

3.1.7. KEGIATAN STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN AGROBISNIS KOMODITI AYAM RAS PETELOR DI KECAMATAN PETANG



Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Badung Memimpin Pembahasan Hasil Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi Ayam Ras Petelor di Kecamatan Petang

Peternakan merupakan subsektor yang sangat penting peranannya dalam menjaga ketahanan pangan, karena pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani, sebagai kebutuhan pokok dalam memenuhi gizi masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, kesadaran gizi, dan perbaikan tingkat pendidikan permintaan produk peternakan (telur, daging dan susu) terus meningkat. Salah satu sumber protein hewani untuk kebutuhan konsumsi adalah telur. Bahan makanan ini mengandung gizi yang baik untuk kehidupan manusia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa konsumsi telur lebih besar daripada konsumsi hasil ternak lain, karena telur mudah diperoleh dengan harga relatif murah dan terjangkau bagi anggota masyarakat yang mempunyai daya beli rendah.

Pengelolaan dan pemeliharaan ayam petelor membutuhkan penanganan khusus dan sangat penting untuk diperhatikan karena dengan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan pertumbuhan ayam yang baik, kondisi ayam yang sehat, tingkat mortalitas yang rendah dan pada akhirnya akan menghasilkan ayam petelor dengan produksi telur yang tinggi. Dalam mengelola usaha peternakan ayam ras petelor, tiap peternak harus memahami unsur penting dalam usaha peternakan, yaitu: manajemen perkandangan, manajemen pemilihan bibit, manajemen pemberian pakan, manajemen kesehatan dan pencegahan penyakit, serta manajemen pemasaran. Kelima unsur ini sangat berperan dalam menentukan tingkat efisiensi dan tingkat pendapatan usaha peternakan, sehingga

animo masyarakat untuk menjalankan usahanya semakin besar dan usaha peternakan ayam petelor dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan studi kelayakan pada usaha peternakan ayam ras petelor untuk memberikan panduan yang terkait dengan pengembangan peternakan ayam ras petelor di Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Dengan adanya kegiatan ini maka akan diperoleh informasi mengenai aspek teknis produksi; aspek sumberdaya manusia; aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; aspek pasar; serta aspek finansial.



Pembahasan Laporan Akhir Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Green House Di Kabupaten Badung Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi Ayam Ras Petelor Di Kecamatan Petang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung di dampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Guna mewujudkan pertanian kontemporer, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan studi kelayakan pengembangan agrobisnis dengan komoditi ayam ras petelor di Kecamatan Petang dan green house di Kabupaten Badung. Studi kelayakan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung bekerjasama dengan Fakultas Peternakan dan Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Wakil Bupati Kabupaten Badung menyampaikan, obsesi untuk mewujudkan suatu pembangunan sektor pertanian yang kontemporer, dalam hal ini ayam ras petelor. Program tersebut nantinya dalam rangka mewujudkan suatu kemandirian dalam kebutuhan berbagai sektor.

“Dalam hal ini masyarakat sangat berminat dan sangat layak serta pantas dari hasil studinya untuk dijadikan semacam industri peternak ras ayam petelor di Badung. Yang skalanya besar, dalam rangka memenuhi kebutuhan di Badung, baik pariwisata maupun

keseharian masyarakat. Berdasarkan studi kelayakan tersebut, akan dibuatkan pola anggaran untuk membangun dua kelompok ternak yang ada di Petang. Anggaran yang diperlukan untuk bangunan kurang lebih Rp16 hingga 17 milyar dan juga akan disiapkan kelanjutan dari studi berikutnya, meliputi strategi bisnis, pola bisnis, dan bisnis plan. "Dalam rangka untuk menjaga dan mengawal konsistensi dan eksistensi, peternak ayam ras petelur tidak akan dilepas, akan tetapi akan dilakukan pendampingan empat hingga lima tahun dan juga menginginkan pertanian kontemporer di Kecamatan Petang, yang sifatnya agrobisnis, akan dibuat juga green house dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk perkebunan tahun 2018 di wilayah setempat. Tidak menutup kemungkinan juga, akan dikembangkan di Badung Selatan dengan memanfaatkan lahan-lahan kering, terutama bagi tata ruang yang diperuntukan hortikultura. "Untuk mewujudkannya Pemerintah akan memfasilitasi dan memediasi terhadap kebutuhan-kebutuhannya, baik dari mulai pembangunan gedung, alat, bibit, obat termasuk dana oprasionalnya. Masyarakat benar-benar disiapkan semuanya, sehingga mereka running untuk melaksanakannya dan juga dilakukan pendampingan.

3.1.8. PENELITIAN DAMPAK KEGIATAN PARIWISATA PADA TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT SEKITAR OBJEK PARIWISATA UNGGULAN DI KABUPATEN BADUNG

Pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung, hal ini disebabkan pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas. Menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) pariwisata dikembangkan karena delapan alasan utama seperti : (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi transportasi akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya, (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai social agar bernilai ekonomi, (4) Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi, (5) Penghasil devisa, (6) Pemicu perdagangan internasional, (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dari sisi kepentingan bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Badung pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yaitu berdampak pada penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation). Pembangunan kepariwisataan memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berusaha dan bekerja keras agar memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata berkesinambungan (Sustainable Development), dengan menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan untuk menyokong kegiatan kepariwisataan. Artinya penggunaan sumber daya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relatif lama. Pembangunan kepariwisataan dengan pelestarian budaya (Culture Preservation), diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya di Kabupaten Badung yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Kabupaten Badung untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang kepariwisataan memberikan kesempatan kepada industri lokal di sekitar obyek wisata untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi wisata, serta kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan untuk meningkatkan kemampuan penerapan teknologi terkini bagi masyarakat. Pengembangan teknologi maju dan tepat guna akan memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya dan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata unggulan. Pembangunan pariwisata unggulan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Badung yang lebih luas dan bersifat fundamental.

Pariwisata unggulan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Badung yang terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya, sehingga dalam hal ini melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung melakukan penelitian terkait dengan Dampak Kegiatan Pariwisata pada Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Badung.

Dari hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja/berusaha di sekitar obyek wisata unggulan di Kabupaten Badung memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi (74%) sedangkan sisanya sebesar (26%) memiliki tingkat kesejahteraan yang sedang.



Kegiatan pariwisata watersport di Tanjung Benoa



Kegiatan pariwisata Pertunjukan tari kecak di Uluwatu.

BAB IV PENUTUP

Kami menyadari bahwa penyajian buku Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2018 ini masih terdapat kekurangan untuk menggambarkan berbagai kegiatan Kelitbangan yang ada di Kabupaten Badung. Namun kami berharap apa yang telah diuraikan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang Kelitbangan di Kabupaten Badung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Penelitian dan pengembangan (BALITBANG) menjadi barometer bagi kegiatan di Kabupaten Badung, oleh karenanya kita sangat berharap akan peranan masyarakat Badung untuk tidak saja mewujudkan Balitbang yang berkelanjutan tetapi juga Balitbang yang mendatangkan manfaat yang berkelanjutan.

Kegiatan Kelitbangan berperan penting dalam menghasilkan berbagai kajian dan penelitian sebagai tahap awal perencanaan yang melahirkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat. Dengan adanya kegiatan kelitbangan diharapkan dapat lebih terarah, terkoordinasi dan menghasilkan kebijakan pemerintah daerah melalui penelitian dan pengembangan.